

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK (Studi Di Kecamatan Pontianak Tenggara)

Oleh:
ROHANDI TARIGAS
NIM: E01110014

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. [Email: vvc.rohandi@yahoo.com](mailto:vvc.rohandi@yahoo.com)

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkendalanya kinerja pelaksana dalam menanggulangi bencana kabut asap. Seperti sumberdaya dalam menanggulangi kabut asap masih kurang memadai, Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah maupun Kota belum optimal, Sosialisasi peduli bencana kabut asap masih kurang, sehingga Tujuan kebijakan belum dapat dipahami oleh masyarakat. Penulis menggunakan teori implementasi dari van Meter dan van Horn (Agustino, 2008:142) yang mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik seperti: ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Ukuran dan tujuan kebijakan, tujuan implementasi penanggulangan bencana kabut asap, sudah tercapai dan dimengerti berbagai pihak, namun dalam hal pendataan kepada masyarakat yang rentan bencana masih dirasakan kurang baik. (2). Sumberdaya, SDM dari BPBD sudah cukup berpengalaman dan memiliki tingkat pendidikan yang baik, namun dari segi jumlah kurang memadai, Tetapi di bantu dengan adanya relawan. Dari segi anggaran yang ada dinilai pemanfaatannya kurang baik dalam menanggulangi bencana. (3). Karakteristik agen pelaksana, seluruh tahap penanggulangan dilakukan berdasarkan standar penyelamatan dilapangan, dan dalam penyebaran tanggung jawab antar instansi sudah cukup baik. (4). Sikap para pelaksana, secara respon dan kontrol pelaksana sudah cukup baik. (5). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, penyampaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan sudah sangat baik dan benar. (6). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Bencana kabut asap mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga terjadi penurunan pendapatan Sedangkan untuk keadaan politik di kota Pontianak saat bencana kabut asap berlangsung masih cukup baik. Saran penelitian ini agar pelaksana meningkatkan pendataan kepada kelompok masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana, Seperti menciptakan Masyarakat Peduli Api/ Asap (MPA) dengan anggaran yang ada.

Kata-kata Kunci: Kinerja Pelaksana, Implementasi kebijakan, Penanggulangan Bencana, Kabut Asap.

ABSTRACT

The problem in this research is constraint manager performance in cope disaster fog smoke.as resource in in cope disaster fog smoke lack enough,communication and coordination between area government although city yet optimum, socialiszation care disaster fog smoke the lack, until purpose the policy can not understand community. Write use theory implementation of van Meter and van Horn (Agustino, 2008: 142) that say at least there is six influence manager performance public as: size and objectives, resource, implementing agency, the attitude of the implementers, communication between organizations, environmental economic, social and political. Methods used is qualitative research method. Research show indicate show: (1). size and objectives policy, the purpose of the implementation of disaster management smog , has already been promoted and understood various parties , but in terms data collection to the community disaster that are vulnerable is still being felt less than good . (2) .resources , human resources of BPBD already pretty experienced and has a good education , but in terms of the number of inadequate , but in bantu with the volunteers .in terms of the existing budget is considered its use less well in tackling the disaster .(3) .characteristic of implementing agent , all reduction stage is based on standard area rescue , and in the spread of responsibility between agencies has been good enough .(4) .attitude program implementers , in responses and implementing control has been good enough .(5) .communication between the organization and implementing activity , information dissemination of policymakers to policy implementation is good and true. (6) .economic environment , social and political .get the smog disaster affecting social and economic conditions the community so there the decline in income while for a state of political in the city of pontianak when disaster smog ongoing still good enough .then advice this study further improve the performance implementers especially in matters of data collection community groups who ranges for disasters smog , make a society that is tough for disasters , as it is creating a Community Care Fire / Smoke (MPA) with the existing budget

Keywords: Manager Performance, Policy Implementation, Cope Disaster, Fog Smoke.

PENDAHULUAN

Bencana kabut asap dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa terjadi di Indonesia. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai daerah yang tidak lepas dari produksi asap. pemerintah daerah di tuntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan daerah masing-masing. Dalam menanggulangi bencana kabut asap yang setiap tahun menyelimuti kawasan Kota Pontianak.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. salah satu bencana yang perlu di selesaikan adalah bencana kabut asap. berdasarkan pengamatan penulis di kota Pontianak ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan setiap tahun kabut asap selalu terjadi di Kota Pontianak seperti: Tujuan kebijakan belum dapat dipahami oleh masyarakat.

Sumberdaya dalam menanggulangi kabut asap masih kurang memadai, Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah maupun Kota belum optimal, Sosialisasi peduli bencana kabut asap masih kurang, maka fokus penelitian ialah pada kinerja implementasi kebijakan penanggulangan bencana kabut asap di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak ditinjau dari ukuran/tujuan, sumberdaya, karakteristik agen, sikap, komunikasi, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja implementasi

kebijakan penanggulangan bencana kabut asap di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang dikaji dari aspek:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap para Pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam ilmu administrasi negara pada kajian kebijakan publik khususnya pada kinerja implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan penanggulangan bencana. serta dapat dijadikan referensi yang berguna kepada masyarakat/pembaca untuk menjadi dasar pemikiran dalam memahami teori implementasi kebijakan. Manfaat Praktis penelitian diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk meningkatkan kinerja implementasi penanggulangan bencana kabut asap yang terjadi di Kota Pontianak.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan

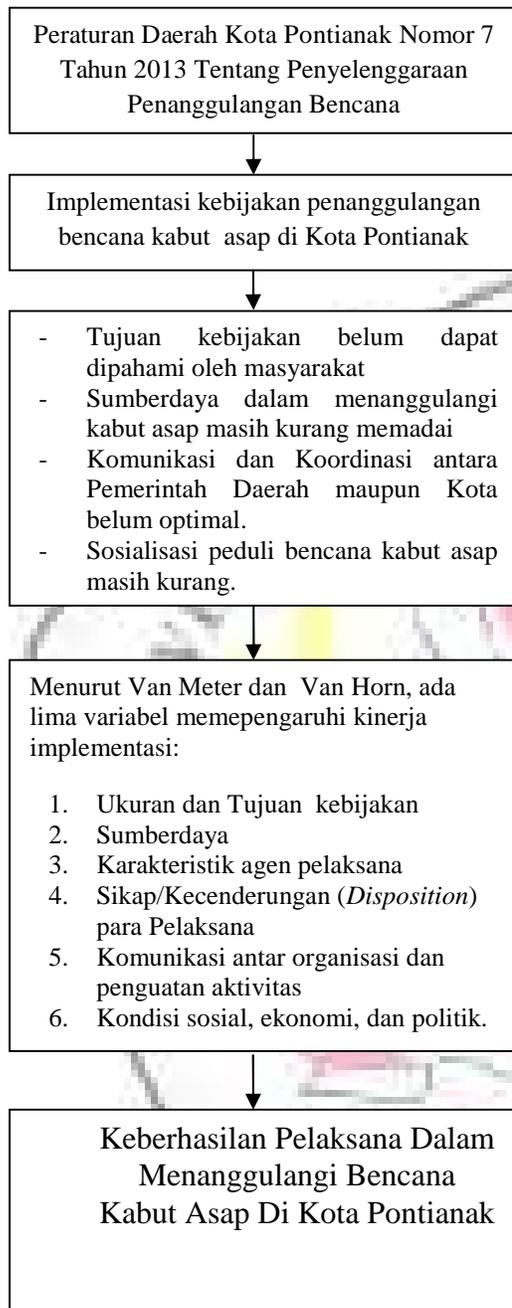
undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut Wijaya dan Suparto (dalam Pasolong, 2010:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransfortasikan suatu rencana kedalam praktik. Hinggis (dalam Pasolong, 2010:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategis. Grindle (dalam Pasolong, 2010:57) implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sependapat mungkin mempengaruhi. Gordon (dalam Pasolong, 2010:57) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2010:64) merumuskan proses implementasi ini sebagai "*those actions by public or private individuals (or grups) that are directed at the achievement of objektivies set forth in prior policy decisions*". (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Menurut van Meter dan van Horn (dalam Agustino,

2008:142) mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, adalah :

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Karakteristik agen pelaksan
- d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dari beberapa paparan di atas, maka teori yang penulis anggap cocok untuk implementasi kebijakan penanggulangan bencana kabut asap di Kota Pontianak pada salah satu kecamatan Pontianak tenggara yaitu yang dikemukakan oleh van meter dan van horn Dengan alasan, penulis berusaha untuk mengungkapkan tindakan implementor yang terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan kabut asap di Kota Pontianak. Berikut adalah kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini :



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah karena peneliti belum mengetahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama yang terjadi dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana kabut asap. Tempat penelitian yang diteliti oleh penulis adalah di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Penelitian yang dilakukann penulis dari bulan agustus 2014 sampai dengan maret 2015.

Subjek dalam penelitian ini diambil secara *purposive*. terdiri dari: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, Yang Terdiri Dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dan Kasi Pencegahan, Pimpinan Kantor Kecamatan Pontianak Tenggara, Pengamat Bencana Kabut Asap, Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kebijakan penanggulangan bencana kabut asap di Kota Pontianak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 Teknik pengumpulan data antara lain: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Dengan alat pengumpulan data yaitu Panduan Observasi (*check list*), Pedoman Wawancara, Dokumentasi. Untuk menganalisis data yang didapat penulis menggunakan teknik analisis taksonomik. menurut bungin (2007:206), teknik analisis taksonomik terfokus pada domain-domain tertentu,

kemudian memilah domain tersebut menjadi sub-domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan..Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan / Verifikasi. Untuk menguji data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. penulis melakukan triangulasi sumber, menurut Patton dalam Moleong (2013 : 330) hal ini dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Berdasarkan hasil wawancara ditegaskan tujuan dari adanya penanggulangan bencana kabut asap adalah karena Indonesia peduli terhadap penyelamatan ekosistem yang ada di bumi. Namun ketika kebijakan ini berada di tingkat daerah tentu tujuannya berbeda dan di perjelas agar memudahkan dalam memahami tujuan ini. Dan tujuan tersebut harus disamakan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat ditegaskan bahwa tujuan dari kebijakan penanggulangan bencana kabut asap adalah melindungi masyarakat yang rentan terhadap resiko bencana. tetapi tidak semua masyarakat merasakan bentuk penanggulangan bencana kabut asap. hal ini tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Pontianak nomor 7 tahun 2013 dalam pasal

43, Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan: (a). pendataan, (b). penempatan pada lokasi yang aman; dan (c). pemenuhan kebutuhan dasar. Namun berdasarkan pernyataan masyarakat bahwa pendataan kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana di Kecamatan Pontianak Tenggara belum merata sehingga saat kabut asap terjadi ada yang tidak merasakan bentuk bantuan tersebut. Melihat tujuan dari kebijakan penanggulangan bencana kabut asap kemudian dibandingkan dengan hasil dilapangan tujuan yang dikonsepskan sudah sesuai dengan keadaan yang ada dimasyarakat. Namun dilihat dari standar pelayanan oleh pelaksana penulis melihat ada beberapa kelompok sasaran masih ada yang belum merasakan bantuan saat bencana kabut asap terjadi. Hal ini tidak tidak selaras dengan beberapa standar dalam penanggulangan bencana yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh pelaksana.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara sumberdaya manusia yang ada ditingkat pelaksana tidaklah cukup untuk menanggulangi bencana kabut asap dikota Pontianak, tetapi memerlukan partisipasi aktif oleh pihak-pihak yang terkait. secara

umum keterampilan dan keahlian para pelaksana sudah sangat memadai dari segi pendidikan dan keterampilan yang didapatnya. Selain sumberdaya manusia, anggaran juga perlu diperhatikan dalam menanggulangi bencana kabut asap, anggaran yang ada sudah dapat dikatakan cukup dalam menanggulangi kabut asap di daerah kota Pontianak tetapi dari segi pemanfaatannya dikatakan kurang baik.

3. Karakteristik agen pelaksana

Dalam pengimplementasian kebijakan, karakter dari para pelaksana kebijakan harus keras dan membina pada aturan serta taat pada sanksi hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dalam menanggulangi bencana kabut asap, pelaksana dalam hal ini BPBD Kota Pontianak selalu menggunakan SOP (*Standar Operational Prosedur*). Selain menggunakan cara ini, pelaksana juga melakukan penyebaran tanggung jawab (*fragmentasi*) antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kabut asap berjalan dengan baik.

4. Disposisi atau sikap para pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Dalam hal ini BPBD Kota Pontianak, Berdasarkan hasil wawancara bahwa respon dan pemahaman

akan kebijakan oleh implementor dapat dikatakan sudah sangat baik. hal ini dilihat dari bagaimana mereka ikut terjun langsung dalam proses kebijakan penanggulangan bencana kabut asap seperti pencegahan bertambahnya kabut asap di Kota Pontianak. Dan untuk kontrol yang dilakukan oleh BPBD Kota Pontianak dikatakan sangat baik dari segi pengawasan terhadap daerah yang dikatakan rawan terjadinya kebakaran lahan.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi dalam penanggulangan bencana kabut asap sangat diperlukan, BPBD Kota Pontianak harus konsisten dan seragam dalam menyampaikan informasi tentang penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa proses penyampaian informasi mengenai penanggulangan bencana kabut asap, dikatakan sudah baik, antara pembuat kebijakan dengan pelaksana namun antara pelaksana dengan masyarakat masih dikatakan sangat kurang. Tetapi dari kejelasan informasi semua pihak sudah tahu adanya isi kebijakan penanggulangan bencana kabut asap. dan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana kabut asap ada konsistensi sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Politik

Kondisi-kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi pelaksana. Keadaan sosial ekonomi masyarakat adalah salah satu keadaan yang dapat mendukung keberhasilan dari implementasi penanggulangan bencana kabut asap di Kota Pontianak. Berdasarkan wawancara diatas ditegaskan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat bencana kabut asap terjadi sangat mengganggu aktivitas mereka yang tentunya mengalami beberapa perubahan sikap dan penurunan pendapatan ekonomi masyarakat. Dan kondisi politik daerah Kota Pontianak saat penanggulangan bencana kabut asap dikatakan sedang baik, sehingga tidak adanya unsure politik yang mengganggu proses kebijakan ini.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Tujuan implementasi penanggulangan bencana kabut asap, sudah tercapai dan dimengerti berbagai pihak. namun dari ukuran dalam hal pendataan kepada masyarakat yang rentan bencana masih dirasakan kurang baik. Khususnya kepada kelompok yang rentan terhadap bencana kabut asap.

b. Sumberdaya

Jumlah sumberdaya manusia pada badan penanggulangan bencana daerah Kota Pontianak dapat dikatakan kurang cukup namun dalam menanggulangi bencana kabut asap ada dukungan dari beberapa relawan baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. secara dari pengalaman dan pendidikan para personilnya sudah dikatakan sangat baik, sedangkan untuk sumberdaya kebijakan berupa anggaran kebencanaan, distribusi sampai kepada pelaksana sudah cukup baik namun dalam hal pemanfaatannya masih di katakan kurang baik.

c. Karakteristik agen pelaksana

Seluruh tahap penanggulangan yang dilakukan berdasarkan standar penyelamatan dilapangan, dan dalam penyebaran tanggung jawab antar instansi sudah cukup baik adanya keterbukaan/kerja sama antar pelaksana.

d. Disposisi atau Sikap para pelaksana

Secara respon pelaksana sudah cukup baik juga menentukan keberhasilan implementasi seperti dari

segi respon ketika bencana terjadi sudah cukup baik dan kontrol oleh implementor salah satunya adalah BPBD Kota Pontianak yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Penyampaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan sudah sangat baik dan sudah benar, tetapi saat komunikasi dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik, tidak semua masyarakat merasakan bentuk sosialisasi tentang kebencanaan. Kejelasan informasi dari pembuat kebijakan dengan pelaksana begitu juga dengan masyarakat sudah begitu jelas dan baik. Untuk konsistensi antar pelaksana, bahwa informasi yang disampaikan sudah dikerjakan sesuai dengan informasi yang diberikan.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi sosial dan ekonomi saat kabut asap terjadi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sehingga masyarakat cenderung lebih banyak berakifitas didalam rumah dan hal ini

menyebabkan penurunan pendapatan bagi sebagian orang yang bekerja diluar ruangan. Sedangkan untuk keadaan politik di kota Pontianak saat bencana kabut asap berlangsung masih cukup baik.

2. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan ini antara lain:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Pendataan masyarakat dalam menanggulangi bencana kabut asap di Kota Pontianak masih dirasakan kurang merata, ada masyarakat yang merasa terbantu tetapi ada juga sebagian masyarakat yang merasa tidak terbantu sama sekali dengan kebijakan ini. Oleh karena itu dalam hal ini beberapa saran dari masyarakat, bahwa pendataan kepada masyarakat harus di tingkatkan lagi, BPBD harus lebih giat mendata masyarakat rentan bencana, sehingga untuk kedepannya semua masyarakat dapat merasakan bentuk kebijakan penanggulangan bencana kabut asap ini.

2. Sumberdaya

Beberapa pihak menyatakan anggaran yang dimiliki pelaksana untuk menanggulangi bencana kabut asap kurang dimanfaatkan

dengan baik. Beberapa pihak menyarankan agar anggaran yang dimiliki untuk menanggulangi kabut asap digunakan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana ini. Seperti menciptakan Masyarakat Peduli Api/ Asap (MPA).

3. Karakteristik agen pelaksana

Beberapa saran dari berbagai pihak agar standar penyelamatan saat bencana terjadi di pertahankan atau lebih ditingkatkan lagi, dan untuk penyebaran tanggung jawab antar instansi lebih ditingkatkan lagi mengingat bencana kabut asap merupakan bencana musiman, sehingga bencana ini dapat diselesaikan sedini mungkin.

4. Disposisi atau Sikap para pelaksana

Dalam hal penanggulangan bencana kabut asap sudah sangat baik. Beberapa saran oleh beberapa pihak agar pelaksana dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran lahan yang setiap tahun selalu ada untuk kawasan kota Pontianak, sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran lahan yang menyebabkan bencana kabut asap di Kota Pontianak.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Antar pelaksana dengan masyarakat di katakan belum baik, Ada Sebagian dari masyarakat yang belum mengerti dan paham. Oleh karena itu komunikasi harus lebih ditingkatkan lagi dengan beberapa cara seperti pemasangan baliho atau spanduk sadar bencana. sehingga dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik sudah dikatakan sangat baik dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan bencana kabut asap, beberapa saran untuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik agar lebih peduli terhadap sesama, dan mempertahankan kondisi sosial masyarakat yang bergotong royong (saling membantu).

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2013. *Kecamatan Pontianak Tenggara Dalam Angka 2013*.
- _____, 2014. *Kecamatan Pontianak Tenggara Dalam Angka 2014*.
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2013. *metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roasdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto,A.E. Dan Sulistyastuti, R.D. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik :Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik-Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT Reflika Aditama.
- Silalahi, Ulber . 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- _____, 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, sumadi. 2012. *Metodologi penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Winarno, budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori, Proses*. Yogyakarta: Media Pressido
- Sumber lain:
- Londok, Imanuel Christo. Tt. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Suatu Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)* diambil tanggal 18 september 2014 dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/4502/4031>.
- Fakhriyani.2011. *Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Dan Tsunami Pemerintah Kota Padang*. Diambil tanggal 18 september 2014 Dari <http://repository.unand.ac.id/17038>
- .Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang *Penanggulangan Bencana*, diakses dari http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2010/04/01/u/u/uu_no.24-2007.doc pada tanggal 17 september 2014.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2013 Tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, di akses dari <http://jdih.pontianakkota.go.id/index.php/perdamenu/perda/perda2013/> pada tanggal 18 september 2014.
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2010 Tentang *Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak*.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontanak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rohandi Tarigar
 NIM / Periode lulus : E0110014
 Tanggal Lulus : 01 April 2015
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 E-mail address/ HP : VVC.Rohandi@Yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabut Asap
Di Kota Pontianak (Studi di Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal ..16..5..2015


 Dr. Rohandi Tarigar, M.S.A.
 NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 16-5-2015


 ROHANDI TARIGAS
 NIM. E0110014

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

